



Rizal Djalil

Resmi Gantikan Hadi Poernomo Jabat Ketua BPK

Fokus Audit ke Depan Soal Raskin dan Bansos

-Pengganti Hadi Poernomo, Rizal Djalil, resmi menjabat sebagai ketua baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 28 April 2014. Rizal berucap sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Hatta Ali, di Gedung Sekretariat MA, Jakarta.

"Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi ketua BPK langsung atau tidak langsung, dengan rupa atau dalil apa pun, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga," ujar Rizal saat membaca sumpah jabatannya.

Penetapan Rizal sebagai pengganti Hadi ini telah diputuskan pada Keputusan Sidang Anggota BPK No. 2/K/I-XII.2/4/2014. Nantinya, dia akan mengemban tugas jabatan selama enam bulan, yaitu dari April-Oktober 2014.

Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Boediono, Jaks Agung Basrief Arief, Hakim Agung Gayus Lumbuun, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad, Pimpinan KPK Zulkarnain, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara.

Tampak pula pejabat pemerintah seperti Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Kesehatan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Adapun sejumlah tokoh lain yang turut menghadiri pelan-



Rizal Djalil selaku pimpinan BPK saat mendatangi Gedung KPK untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Jakarta, Selasa 23 Maret 2010

tikan tersebut antara lain Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk, Gatot Suwondo, Kepala BPKP Mardiasmo, mantan Ketua BPK Anwar Nasution, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, politisi PDIP Puan Maharani, dan akademisi Efendi Gazali.

Fokus Audit ke Depan Soal Raskin dan Bansos

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyatakan bahwa kerja audit atau pemeriksaan ke depan akan lebih fokus pada program-program yang menysasar masyarakat.

"Seperti masalah raskin (beras untuk rumah tangga miskin)," kata Rizal usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, Senin 28 April 2014.

Menurut Rizal, BPK bersedia mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengaudit soal penyelewengan penyaluran bantuan raskin. Hal ini berkaitan dengan temuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa terkait indikasi penyelewengan bantuan raskin yang tinggi di lapangan, khususnya di daerah.

Hatta menyalahkan pemerintah daerah yang tidak becus mendistribusikan bantuan tersebut. Peran pemerintah daerah dalam pergawasan dan distribusinya dinilai masih minim. [Baca: Hatta Mengaku Program Penyaluran Raskin Rawan Penyimpangan.]

Oleh karenanya, menurut Rizal, BPK siap memberikan bantuan dengan melakukan audit penya-

luran raskin untuk mengatasi permasalahan yang ada.

"Kami akan memberikan rekomendasi ke depannya bagaimana," kata Rizal.

Selain itu, auit BPK juga akan lebih menyoroti program bantuan sosial (bansos) agar meminimalisasi penyelewengan dan menjadi lebih tepat sasaran. "Kami akan meluruskan bansos yang Rp90 triliun itu agar tepat guna dan sampai kepada yang berhak," kata Rizal.

Namun, BPK juga akan tetap melaksanakan tugas rutin seperti audit laporan keuangan setiap tahun. "Fokus kami adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 86 kementerian/ lembaga serta 542 kabupaten/kota dan provinsi. Akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Rizal. (ita/art/ VIVAnews)